

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

GAKKUM LHK
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
WILAYAH SUMATERA

THE AGAINST
THE X-CRIME



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SUMATERA**

TAHUN 2022



Subhan, S.Hut, M.Si,
Kepala Balai

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama tahun 2022, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai PPHLHK) Wilayah Sumatera berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya melalui dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022. Balai PPHLHK Wilayah Sumatera adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen ini menguraikan sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya serta mengukur akuntabilitas kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera melalui indikator kinerja dan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Capaian kami selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat, lembaga non pemerintah, pemerintah pusat dan daerah serta unit terkait. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atau dukungan dan kerjasama selama ini, kami berharap capaian kinerja tahun 2022 ini dapat menjadi gambaran dan acuan dalam meningkatkan meningkatkan penegakan hukum ke depan.

Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini dan semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

1 BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. SUMBER DAYA
- E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

2 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024
- B. TARGET KERJA DAN RENCANA KERJA
- C. ALOKASI ANGGARAN
- D. POHON KINERJA

3 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA
- B. KINERJA ANGGARAN
- C. CAPAIAN TEMATIK

4 BAB IV

PENUTUP

DAFTAR TABEL

- TABEL 1.1 Sebaran Pegawai Balai PPHLHK Wilayah Sumatera 2022
- TABEL 1.2 Anggaran Balai PPHLHK berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022
- TABEL 1.3 Posisi BMN dalam Neraca per 31 Desember 2022
- TABEL 2.1 Program dan Indikator Kinerja Program Unit kerja Eselon I Ditjen PHLHK
- TABEL 2.2 Target Kinerja Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024
- TABEL 2.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024
- TABEL 2.4 Perjanjian Penetapan Kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022 (Revisi)
- TABEL 3.1 Capaian Kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022
- TABEL 3.2 Capaian IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen PHLHK
- TABEL 3.3 Capaian IKK Pencegahan dan Pengamanan Hutan
- TABEL 3.4 Jumlah Operasi di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Tahun 2022
- TABEL 3.5 Lokasi Operasi Penambangan Tanpa Izin dan Luasan yang Diamankan
- TABEL 3.6 Capaian IKK Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
- TABEL 3.7 Jumlah Pengaduan di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Sumatera Tahun 2022
- TABEL 3.8 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sektor Tahun 2022
- TABEL 3.9 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2022
- TABEL 3.10 Jumlah Pengawasan berdasarkan Sektor Industri/Jenis Usaha
- TABEL 3.11 Hasil Pengawasan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022
- TABEL 3.12 Capaian IKK Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- TABEL 3.13 Jumlah P-21 berdasarkan Tipologi Kasus Tahun 2022
- TABEL 3.14 Jumlah P-21 di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022
- TABEL 3.15 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
- GAMBAR 1.2 Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022
- GAMBAR 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK
- GAMBAR 3.1 Operasi pencegahan dan pengamanan hutan tahun 2022 meliputi kejahatan TSL, Penambangan tanpa izin, dan perambahan Kawasan hutan
- GAMBAR 3.2 Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi.
- GAMBAR 3.3 Kasus penegakan hukum pidana LHK sampai P21.

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1	Sebaran Pegawai Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022
GRAFIK 1.2	Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022
GRAFIK 3.1	Jumlah Operasi Berdasarkan Tipologi Tahun 2022
GRAFIK 3.2	Sebaran Operasi di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Tahun 2022
GRAFIK 3.3	Jumlah Pengaduan Tahun 2022
GRAFIK 3.4	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2022
GRAFIK 3.5	Jumlah Pengawasan Tahun 2022
GRAFIK 3.6	Hasil Pengawasan Terhadap 189 Perusahaan Tahun 2022
GRAFIK 3.7	Hasil Pengawasan Berdasarkan Provinsi Tahun 2022
GRAFIK 3.8	Sebaran P-21 Berdasarkan Provinsi 2022
GRAFIK 3.9	Capaian (%) Anggaran Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022
GRAFIK 3.10	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama tahun 2022, Balai PPHLHK Wilayah Sumatera berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya melalui dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 ini. Dokumen ini menguraikan sejauh mana pencapaian program dan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.

Laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan penyempurnaan berbagai kebijakan pada periode yang akan datang.

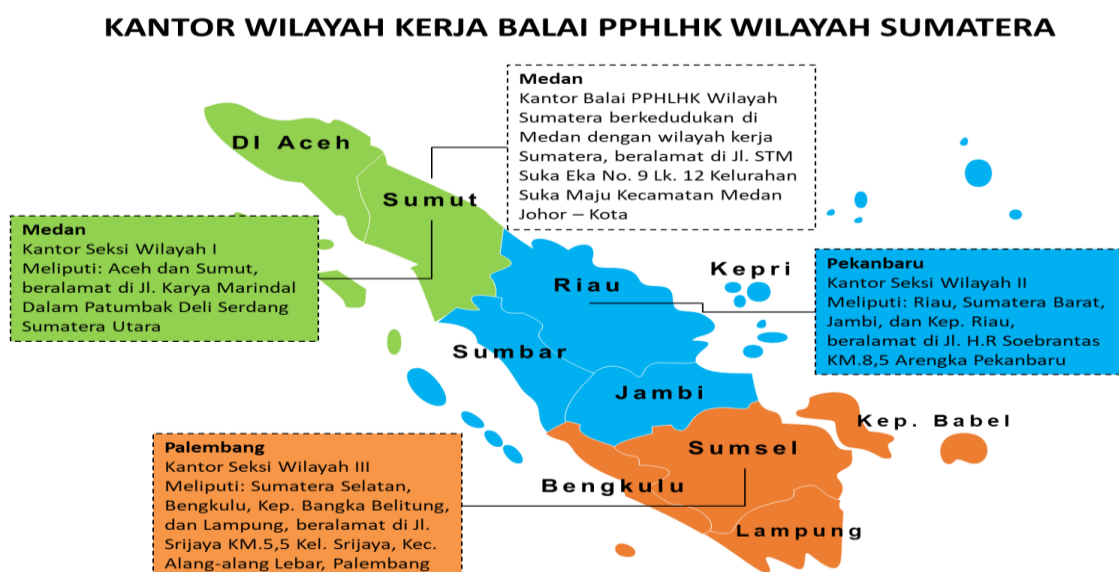
B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.1/7/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai PPHLHK Wilayah Sumatera memiliki tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
4. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;

5. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
6. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
9. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera adalah jabatan Eselon III-a yang disebut Kepala Balai dan jabatan Eselon IV-a yang disebut Kepala Subbagian berkedudukan di Medan sedangkan jabatan Eselon IV-a yang disebut Kepala Seksi berkedudukan pada 3 (tiga) wilayah kerja yakni: Seksi Wilayah I meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara. Seksi Wilayah II meliputi provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat. Seksi Wilayah III meliputi provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Peta Wilayah Kerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dijelaskan pada Gambar 1. Sebagai berikut:



GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.1/7/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sesuai Gambar 1.2 sebagai berikut:



GAMBAR 1.2 Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

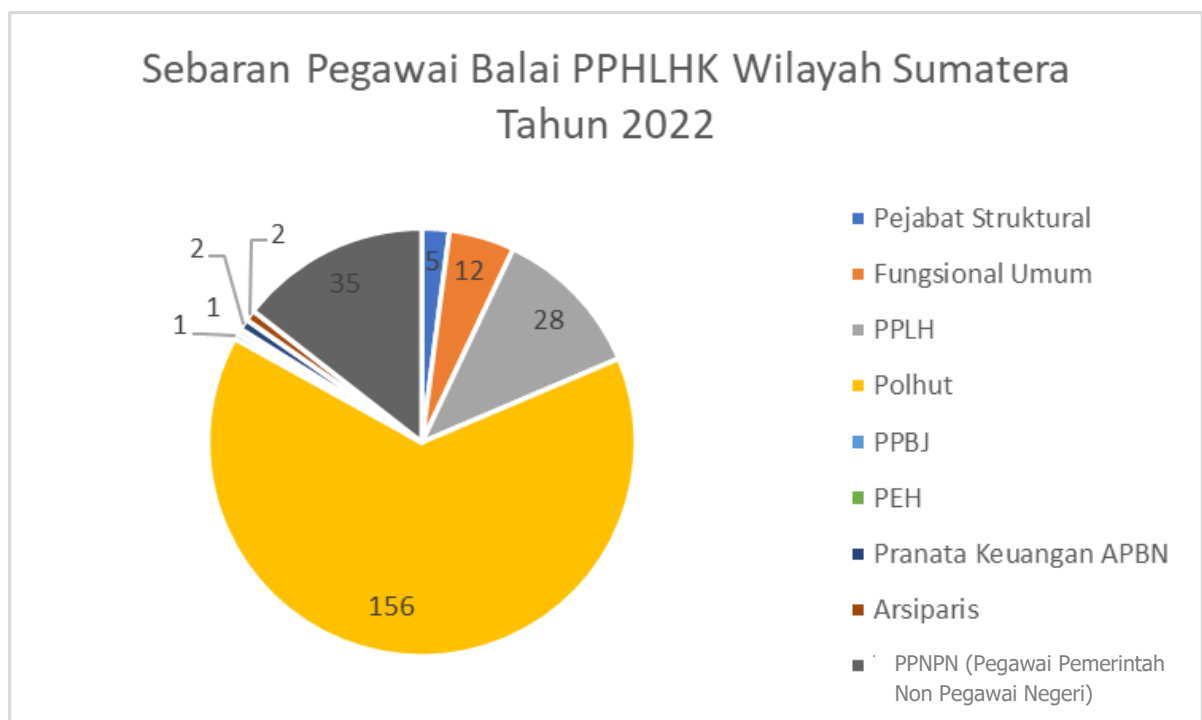
D. SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022, Balai PPHLHK Wilayah Sumatera didukung oleh 242 orang ASN yang terdiri dari 207 orang PNS dan 35 orang pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). PNS tersebut meliputi 5 Pejabat Struktural, 12 Fungsional Umum, 28 PPLH, 1 PPBJ, 156 Polhut, 1 PEH, 2 Pranata Keuangan APBN, 2 Arsiparis. Kebutuhan SDM masih kurang apabila dibandingkan dengan beban kerja setiap tahunnya yang tersedia pada Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Pemetaan jabatan sesuai keahlian atau kompetensi sangat diperlukan sehingga setiap pegawai dapat bekerja optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Terakhir, kebutuhan terkait pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai masih sangat kurang, mengingat tuntutan pekerjaan yang sangat dinamis bagi pejabat fungsional umum, pejabat fungsional dan pegawai PPNPN. Sebaran di setiap seksi wilayah tergambar dalam tabel 1.1.

TABEL 1.1 Sebaran Pegawai Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

No	Wilayah Kerja	Pejabat Struktural		Fungsional Umum		PPLH		Polhut		PPBJ		PEH		Pranata Keuangan APBN		Arsiparis		Tenaga Kontrak		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Kantor Balai	2	-	5	2	2	2	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	7	6	36
2	Seksi Wilayah I	1	-	2	-	4	3	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	48
3	Seksi Wilayah II Pekanbaru	1	-	2	-	6	4	41	3	-	-	1	-	-	-	-	2	7	1	68
4	Seksi Wilayah II Mako Jambi	0	-	1	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
5	Seksi Wilayah III	1	-	-	-	3	4	37	4	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	57
Total		5	0	10	2	15	13	145	11	1	0	1	0	0	2	0	2	25	10	242



GRAFIK 1.1 Sebaran Pegawai Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

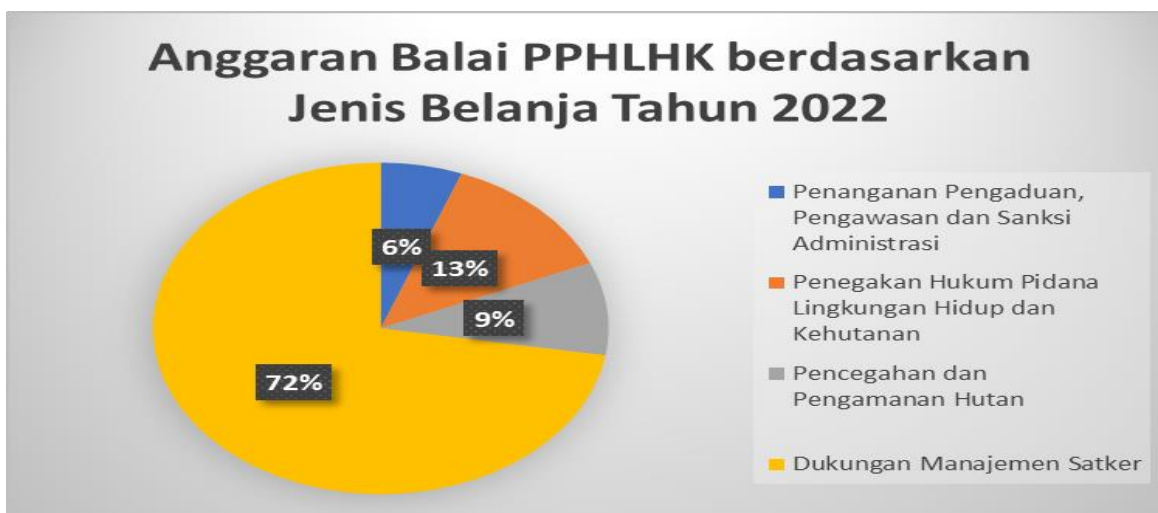
Penataan jabatan fungsional umum menjadi fungsional tertentu berdampak terhadap pemetaan jabatan fungsional dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Jabatan fungsional yang paling banyak diminati adalah jabatan fungsional Polhut, Arsiparis, dan PPLH. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut diperlukan pelatihan dasar dan tingkat lanjutan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dengan baik. Dengan meningkatnya kebutuhan kompetensi maka diperlukan tambahan anggaran dana kedepannya untuk mengakomodir pelatihan para calon jabatan fungsional Polhut, Arsiparis, dan PPLH.

Sumber Daya Anggaran

Pada awal tahun 2022, Balai PPHLHK Wilayah Sumatera memperoleh anggaran sebesar Rp 43,051,645,000,-. Dengan komposisi: Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebesar Rp 2,490,018,000 atau 5,78%, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 5,494,290,000 atau 12,76%, dan Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebesar Rp 3,902,497,000 atau 9,06%, Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp 31,164,840,000 atau 72,39% yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

TABEL 1.2 Anggaran Balai PPHLHK berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Persentase (%)
1	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	2.490.018.000	5,78
2	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.494.290.000	12,76
3	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	3.902.497.000	9,06
4	Dukungan Manajemen Satker	31.164.840.000	72,39
Total		43.051.645.000	100



GRAFIK 1.2 Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2022

Pagu anggaran Balai PPHLHK Wilayah Sumatera mengalami peningkatan seiring jumlah beban kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Serapan anggaran yang paling banyak berada pada pembayaran gaji pegawai Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Jenis kegiatan teknis Balai PPHLHK Wilayah Sumatera masih sangat kurang dikarenakan jumlah pengaduan dan pengawasan usaha kegiatan dan jumlah penanganan kasus kehutanan dan lingkungan hidup yang terus meningkat sehingga diperlukan tindak lanjut dari pimpinan tinggi terhadap alokasi pagu anggaran Balai PPHLHK Wilayah Sumatera kedepannya.

Sarana dan Prasarana

Posisi BMN Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dalam neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.3 Posisi BMN dalam Neraca per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nilai (Rupiah)
1.	Tanah	4.249.100.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	28.796.330.666,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.632.727.755,00
4.	Irigasi	1.270.322.400,00
5.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	491.654.750,00

Aset tersebut merupakan hasil mutasi tambah yang terdiri dari pengadaan/pembelian DIPA Balai PPHLHK Wilayah Sumatera tahun 2017 dan transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai PPHLHK Wilayah Sumatera memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensial dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal yakni sebagai berikut:

1. Internal

- Kualitas sarana dan prasarana pendukung dan teknologi BPPHLHK Wilayah Sumatera perlu dilakukan peningkatan;
- Pagu anggaran membatasi pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Sumatera;
- Beban pekerjaan BPPHLHK Wilayah Sumatera setiap tahunnya meningkat;
- Dimandatkannya 7 Undang-Undang terkait lingkungan hidup dan kehutanan untuk melaksanakan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- Belum optimalnya pemetaan kompetensi SDM untuk mendukung tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Sumatera
- Belum adanya peningkatan kompetensi SDM yang terencana dalam 5 tahun ke depan sehingga memenuhi beban tugas dan fungsi untuk penempatan/penugasan, kebutuhan training serta penambahan rekrutmen SDM;
- Tidak semua undang-undang yang dimandatkan kepada Ditjen PHLHK dikuasai oleh PPNS lingkup BPPHLHK Wilayah Sumatera (contoh: Undang-undang Konservasi Tanah dan Air serta undang-undang Pengelolaan Sampah);
- Belum optimalnya dukungan para pihak seperti aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan kualitas Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan masrakat dan publik;
- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dari segi sumber daya manusia belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitasnya untuk menghadapi tantangan bidang LHK yang terus meningkat setiap tahunnya; dan
- Belum terlaksananya pengelolaan eco-office.

2. Eksternal

- Pembangunan pola kerjasama yang baik kepada seluruh bagian untuk memudahkan penyelesaian tugas;
- Pelibatan multistakeholder seperti internal eselon teknis KLHK, pemerintah daerah dan akademisi secara partisipatif dalam penanganan kasus di daerah;
- Peningkatan pola kerja kolaboratif dengan para pihak Aparat Penegak Hukum Lainnya untuk penanganan kasus;
- Masih adanya beban terkait penanganan gugatan hukum yang belum dapat ditangani secara mandiri;
- Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan multidoor masih terkendala oleh kapasitas operasionalnya;
- Pelaksanaan kegiatan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terkendala kebutuhan lain pada pihak eksternal; dan
- Dukungan pihak eksternal yang masih belum merata pada seluruh wilayah kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Klhk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disingkat menjadi RPJMN 2020-2024) telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Oleh karena seluruh aktivitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024, maka visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat menjadi KLHK) adalah sama dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, demikian pula halnya dengan seluruh unit kerja di bawah KLHK, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat menjadi Ditjen PHLHK).

Untuk memenuhi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, maka KLHK memiliki visi yaitu “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang inovatif dan berdaya saing dengan berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan” dan misi antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing; dan
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Dari misi KLHK tersebut di atas kemudian diturunkan menjadi beberapa sasaran straregis. Sasaran strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

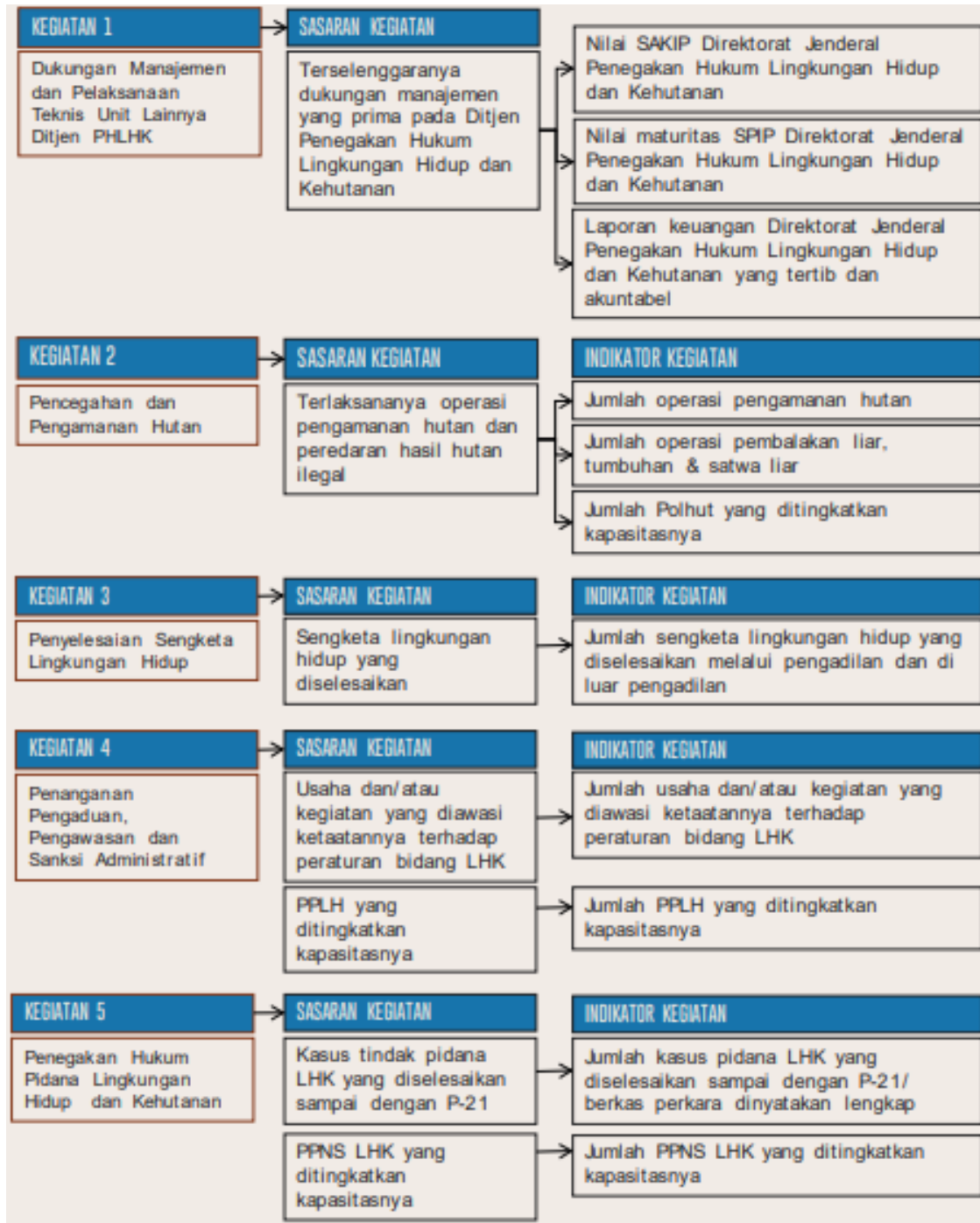
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) yang dilaksanakan oleh Ditjen PHLHK diturunkan dari Sasaran Strategis KLHK nomor 4, yaitu Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing dan Indikator Kinerja Utama nomor 14, yaitu Penyelesaian kasus bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

TABEL 2.1 Program dan Indikator Kinerja Program Unit kerja Eselon I Ditjen PHLHK

Program	Sasaran Program	Indikator Program
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.	Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK.
	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman.	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman.
	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Jumlah kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Unit Kerja Eselon II dan UPT

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat menjadi BPPHLHK) Wilayah Sumatera merupakan perpanjangan tangan dari Unit Kerja Eselon II Ditjen PHLHK di daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera merupakan kegiatan dari Unit Kerja Eselon II Ditjen PHLHK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera sesuai dengan gambar berikut:



*Sumber: Renstra Ditjen Gakkum 2020 – 2024

GAMBAR 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK

B. TARGET KERJA DAN RENCANA KERJA

Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 yang menjadi dasar Perubahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui Permen LHK Nomor: P.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/1/2022, hal tersebut yang menjadi amanat Rencana Strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui Permen LHK Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2022 yang diturunkan menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis Jangka Menengah Dan Jangka Panjang. Rencana kerja ini juga menjadi acuan menetapkan Indikator Penilaian Kinerja sebagai instrument mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Untuk Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sumatera 2020-2024, target kinerja yang direncanakan untuk kegiatan BPPHLHK Wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2 Target Kinerja Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis				
			2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen PHLHK	Layanan dukungan manajemen UPT	Layanan	1	1	1	1	1
	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	Hektar (ribu)	400	535	500	550	500
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan	Operasi	19	24	26	30	35
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan	Operasi	27	40	48	54	69
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Personil	0	161	165	168	172
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Pengaduan	74	111	125	144	155
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Pengaduan	168	265	315	379	429
	Pengawasan Bidang LHK	Perusahaan	90	135	153	175	189
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus	46	76	85	93	104
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	5	5	8	8

Kerangka Pendanaan

Untuk Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sumatera 2020-2024, kerangka pendanaan yang direncanakan untuk kegiatan BPPHLHK Wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen PHLHK*	Layanan dukungan manajemen UPT	-	-	-	-	-
	Layanan perkantoran	-	-	-	-	-
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan					
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan	17.955.000	24.203.000	27.553.000	33.059.000	34.750.000
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan	13.890.000	20.974.000	25.262.000	28.344.000	40.638.000
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	400.000	450.000	500.000	500.000
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Penanganan Pengaduan Perusahaan	2.319.358.537	4.136.038.385	5.044.350.093	6.096.743.183	6.976.706.725
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	1.708.300.000	3.052.415.508	3.743.005.817	4.497.657.713	5.154.934.441
	Pengawasan Bidang LHK	4.130.640.000	7.371.775.636	9.048.225.103	10.858.009.476	12.466.867.153
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	14.895.628.000	29.120.543.000	35.536.700.000	44.136.804.000	57.537.845.000
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	1.295.272.000	2.532.221.000	3.090.148.000	3.838.157.000	5.003.291.000
		-	-	-	-	-

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam Permenpan Nomor. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen tersebut untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Direktur Jenderal PPHLHK dan Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera telah menandatangani Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022.

TABEL 2.4 Perjanjian Penetapan Kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022 (Revisi)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	11 Operasi
		Peningkatan Kapasitas POLHUT	40 Orang
2	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	143 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
3	Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	46 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
4	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Acara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Akuntabilitas ini juga menjelaskan perbandingan antara target dan capaian seluruh indikator yang diukur. Selain perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2022, juga dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Akuntabilitas Kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera merupakan perwujudan kewajiban instansi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Tahun 2022, capaian kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera telah berhasil melebihi target atau 104,3% dari 9 target indikator kinerja kegiatan atau dari 4 sasaran kegiatan. Berikut capaian kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022:

TABEL 3.1 Capaian Kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
	Meningkatnya pelaku usaha dan atau kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas PPLH	5 Orang	5 Orang	100
		Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	143 Perusahaan	158 Perusahaan	106
2.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Peningkatan kapasitas PPNS	4 Orang	4 Orang	100
		Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	46 Kasus	50 Kasus	108
3.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan				
	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7 Operasi	7 Operasi	100
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	11 Operasi	11 Operasi	100
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	40 Orang	50 Orang	125
4.	Dukungan Manajemen Satker				
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Balai PPHLHK	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	1 Layanan	1 Layanan	100

Capaian kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022 yang paling tinggi yaitu peningkatan kapasitas polisi kehutanan dari target 40 orang terealisasi sebanyak 50 orang (125%), selanjutnya kasus tindak pidana LHK P21 perseorangan dari target 46 kasus terealisasi sebanyak 50 kasus (108%), pengawasan ketaatan LHK terhadap badan usaha dari target 143 perusahaan terealisasi sebanyak 158 perusahaan (106%), peningkatan kapasitas PPLH dari target 5 orang terealisasi sebanyak 5 orang (100%), peningkatan kapasitas PPNS dari target 4 orang terealisasi sebanyak 4 orang (100%). Kemudian layanan perkantoran dan layanan umum masing masing 1 layanan (100%).

Kegiatan 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen PHLHK

Pada tahun 2022, kegiatan dukungan manajemen telah direalisasikan sebesar 100% atau satu layanan, meliputi penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (meliputi penyusunan Lakip, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan penyelenggaraan SPIP), penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan administrasi keuangan, penyelenggaraan koordinasi atau konsultasi ke

Pusat, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pemenuhan sarana dan prasarana serta pemeliharannya.

TABEL 3.2. Capaian IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1a.	Layanan dukungan manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100
1b.	Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Kegiatan 2: Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Pada tahun 2022, kegiatan pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman keamanan kawasan hutan memenuhi 2 IKK yaitu: Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan dan Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Capaian IKK tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL 3.3 Capaian IKK Pencegahan dan Pengamanan Hutan

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2a.	Operasi pengamanan kawasan hutan	7 Operasi	7 Operasi	100
2b.	Operasi peredaran hasil hutan illegal/TSL	11 Operasi	11 Operasi	100

Sebanyak 18 kegiatan operasi telah dilaksanakan guna mencegah dan mengamankan gangguan dan ancaman keamanan kawasan hutan di wilayah Sumatera yang meliputi, operasi TSL sebanyak 11 atau 100%, operasi illog sebanyak 7 atau 100%. Jenis operasi pencegahan dan pengamanan hutan yang paling sering dilakukan operasi penangkapan kegiatan Illegal Logging dan perambahan hasil hutan kayu serta hasil hutan non kayu. Hasil operasi pencegahan dan pengamanan hutan masih menangkap para pelaku pekerja tingkat tapak, belum dapat menyentuh sumber pendana dari kegiatan tersebut. Undang-undang kehutanan belum optimal dapat menjerat sumber pelaku kejahatan kehutanan dan aktor-aktor dibalik kegiatan tersebut sering sekali merupakan aparat penegak hukum lainnya serta pejabat daerah yang berwenang menjadi hambatan suatu operasi dapat berjalan sukses.

Dalam beberapa tahun belakang ini, operasi peredaran TSL menjadi sangat sering dilakukan oleh Balai PPHLHK wilayah sumatera. Barang TSL yang sering dilakukan penangkapan seperti penjualan kulit harimau, sisik tringgiling, dan paruh burung rangkok.

Jenis TSL yang dilakukan penangkapan merupakan jenis-jenis yang telah dilindungi atau langka.

TABEL 3.4 Jumlah Operasi di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Tahun 2022

PROVINSI	Kejahatan TSL	Pembalakan dan Peredaran Kayu	Penambangan Tanpa Izin	Perambahan	Total
Aceh	1				1
Sumut	1		1		2
Riau				2	2
Sumbar	2	1			3
Kepri					0
Jambi	1	1			2
Sumsel	1	1		2	4
Bengkulu					0
Kep. Babel					0
Lampung	1	2			3
Grand Total	7	5	1	4	17



GRAFIK 3.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Tipologi Tahun 2022

Sebaran lokasi kegiatan operasi Balai PPHLHK wilayah Sumatera lebih sering pada provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Ketiga lokasi tersebut merupakan daerah rawan tindak pidana kehutanan dikarenakan provinsi tersebut masih memiliki cukup luas kawasan hutan. Aktivitas tindak pidana kehutanan pada ketiga provinsi tersebut semakin tinggi diakibatkan jumlah kebutuhan lahan yang semakin tinggi maka pengurangan luas kawasan hutan terus terjadi dan dialihfungsikan dengan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat atau pelaku usaha lainnya.



GRAFIK 3.2. Sebaran Operasi di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Tahun 2022

2a. Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan

Capaian IKK luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan adalah sebesar 211.900 hektar atau 105,95% dari target 200,000 hektar, melalui 9 kegiatan operasi yakni 4 operasi PETI, 1 operasi penambangan tanpa izin, 13 operasi TSL dan 17 operasi perambahan, illegal logging, serta illegal drilling. Kegiatan gangguan dan ancaman bidang kehutanan setiap tahunnya terus meningkat, seiring terus berkurangnya Kawasan hutan di Indonesia. Hasil pencegahan dan pengamanan hutan masih menangkap para pelaku pekerja tingkat tapak, belum dapat menyentuh sumber pendana dari kegiatan tersebut. Undang-undang kehutanan belum optimal dapat menjerat sumber pelaku kejahatan kehutanan dan aktor-aktor dibalik kegiatan tersebut sering sekali merupakan aparat penegak hukum lainnya serta pejabat daerah yang berwenang menjadi hambatan suatu operasi.

TABEL 3.5 Lokasi Operasi Penambangan Tanpa Izin dan Luasan yang Diamankan

Provinsi	Operasi TSL			Operasi Illog			Operasi Perambahan	
	kali	Hasil	luas (Ha)	kali	Hasil	luas (Ha)	kali	luas (Ha)
Aceh	1	1 Lembar Kulit Harimau Sumatera tanpa gigi taring beserta Tulang belulang					-	
Sumut	1	1. Sisik Tringgiling dengan berat ± 19 (sembilan belas) kilogram 2. 8 (delapan) potong Lidah Trenggiling yang sudah dikeringkan					1	
Riau							2	208
Sumbar	2	1. Mengamankan 30 (Tiga Puluh) jenis satwa yang dilindungi berupa opsetan satwa dan bagian-bagiannya 2. Satu kantong plastik warna biruyang berisi sisik trenggiling dengan berat sekira 4 Kg	391,067	1				
Kepri	-							
Jambi	1	-Buah karung putih yang berisi Sisik trenggiling seberat kurang lebih 7 Kg *-1 buah plastic warna biru yang berisi kuku macan tutul 18 buah *1 buah plastic warna biru yang berisi taring macan tutul 3 buah *1 buah plastic warna hitam yang berisi taring beruang 3 buah *1 buah plastic transparan yang berisi kuku beruang 36 buah	136275	1	1. Kayu Olahan berbagai ukuran sebanyak 64 Keping			
Sumsel	1	- 1 (satu) buah Gading Gajah dengan ukuran panjang 77 cm, keliling 28 cm, diameter 8,5 cm dan berat 2,15 kg - 1 (satu) buah opsetan tengkorak kelapa kijang		1		88000		
Bengkulu								
Kep. Babel								
Lampung	1	-3 ekor musang pandan - 3 ekor monyet ekor panjang - 2 ekor kucing kuwuk (kucing hutan) - 1 ekor owa ungko		2	-2,6313 m3 kayu jenis sonokeling - 0,5637 m3 Kayu Bulat Jenis Sonokeling - 0,3769 m3 Kayu Olahan Jenis Sonokeling	22249,31	2	100000
TOTAL	7	9 ekor, 1 Lembar Kulit harimau, 30 (Tiga Puluh) jenis satwa yang dilindungi berupa opsetan satwa dan bagian-bagiannya Sisik Tringgiling dengan berat ± 30 Kg, Kuku macan Tutul 18 buah, Taring macan tutul 3 buah, taring beruang 3 buah, kuku beruang 36 Buah, Gading Gajah 1 buah, 1 Buah Opsetas tegkorak Kepala kijang	136666,07	5	3.5719 M³	88000	5	100208

2b. Jumlah operasi peredaran hasil hutan illegal.

Capaian IKK dari **jumlah operasi peredaran hasil hutan illegal** adalah sebanyak 11 operasi atau 100% dari target 11 operasi yang terdiri dari 6 operasi peredaran TSL dan 5 operasi pembalakan serta peredaran kayu ilegal.

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan			
1	Kejahatan TSL		<p>Konferensi pers pada Jumat, 3 Juni 2022 tentang penetapan 3 orang tersangka penjual kulit harimau sumatera di Bener Meriah yang melibatkan mantan Bupati Bener Meriah Aceh sebagai tersangka.</p> <p>Barang bukti yaitu 1 lembar kulit harimau sumatera beserta tulang belulanganya tanpa gigi taring.</p>
2	Penambangan tanpa izin		<p>Tim gabungan Balai Gakkum KLHK Sumatera bersama Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DLH Kabupaten Bangka Tengah, dan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah hentikan kegiatan tambang timah inkonvensional (TI), serta mengamankan dua pelaku, beserta 23 mesin TI, dan tujuh sepeda motor dalam operasi gabungan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2022 di Tahura Bukit Mangkol, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
3	Perambahan		<p>Konferensi pers pada 22 November 2022 tentang operasi gabungan oleh Balai Gakkum KLHK Sumatera dan Polda Riau. Operasi gabungan dilaksanakan pada Senin, 14 November 2022 untuk menangkap aktor intelektual perambahan kawasan hutan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.</p>

Kegiatan 3: Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Pada tahun 2022, capaian IKK Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah telah tertanganinya 158 perusahaan atau 106,4% dari target 143 perusahaan terdiri dari 97 pengaduan telah selesai, 19 pengawasan usaha dan 42 kegiatan pengambilan data informasi potensi pengaduan terhadap kegiatan usahan yang tidak memiliki perizinan.

TABEL 3.6 Capaian IKK Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

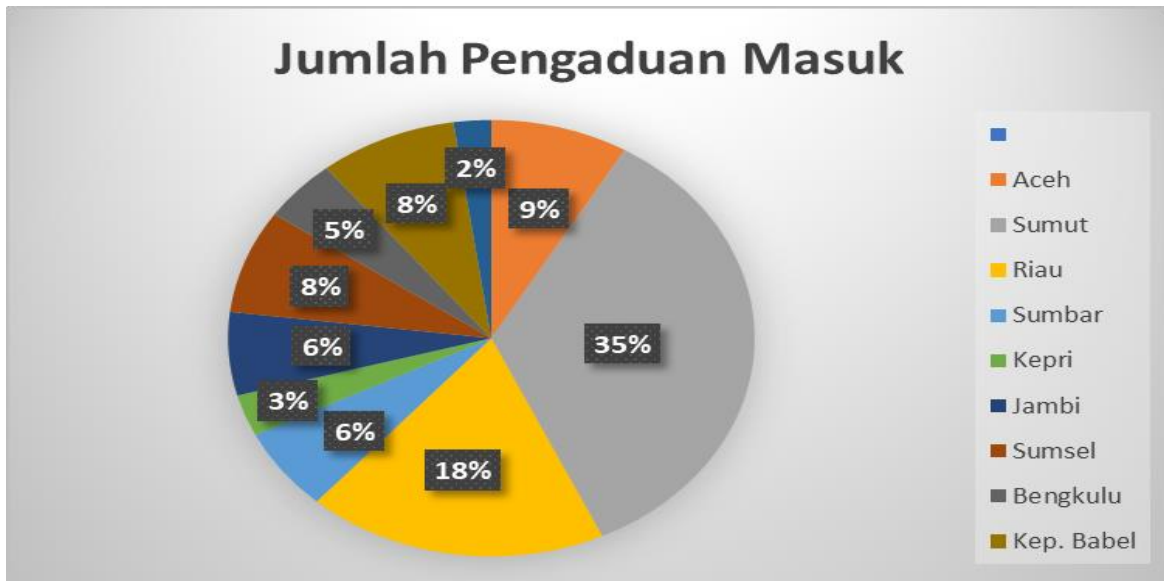
	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK.	143 Perusahaan	158 Perusahaan	106,4

Penanganan Pengaduan

Capaian IKK Penanganan Pengaduan, Balai PPHLHK telah menangani 132 pengaduan yang masuk dengan rincian 97 pengaduan telah selesai dilakukan verifikasi lapangan dan 35 pengaduan masih dalam proses penanganan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ditambah 42 kegiatan pengambilan data informasi potensi pengaduan terhadap kegiatan usahan yang tidak memiliki perizinan di provinsi Riau.

TABEL 3.7 Jumlah Pengaduan di Wilayah Kerja Balai PPHLHK Sumatera Tahun 2022

No.	Seksi Wilayah	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Status		Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Tanpa Perizinan
				Proses	Selesai	
1	SW-1	Aceh	11	5	6	0
2	SW-1	Sumut	46	25	21	0
3	SW-2	Riau	24	2	22	42
4	SW-2	Sumbar	8	1	7	0
5	SW-2	Kepri	5	1	4	0
6	SW-2	Jambi	8	1	7	0
7	SW-3	Sumsel	10	0	10	0
8	SW-3	Bengkulu	6	0	6	0
9	SW-3	Kep. Babel	11	0	11	0
10	SW-3	Lampung	3	0	3	0
Total			132	35	97	42



GRAFIK 3.3 Jumlah Pengaduan Tahun 2022

Berdasarkan sebaran penanganan pengaduan yang terbanyak berada pada provinsi Sumatera Utara dan Riau. Kemudian, jumlah penanganan pengaduan yang paling sedikit berada pada provinsi Kepulauan Riau dan Bengkulu. Kedua provinsi tersebut sangat sedikit dilakukan penanganan pengaduan dikarenakan aksesibilitas keduanya sulit dan mahal. Balai PPHLHK wilayah Sumatera mencatat 132 pengaduan yang telah masuk secara langsung atau melalui surat, SMS, email, Telepon, website aplikasi pengaduan, WhatsApp dan media sosial serta melampirkan bukti atau data pendukung sesuai dengan formulir pengaduan. Ada 35 pengaduan yang masih dalam proses penanganan dan belum terselesaikan oleh pelaksana kegiatan.

Ada beberapa hal yang menghambat proses penyelesaian pengaduan pada Balai PPHLHK wilayah Sumatera yaitu: *pertama*, pengaduan yang bersifat dinamis yang tidak mengenal waktu administrasi menjadi kendala utama penyelesaian pengaduan, kebutuhan anggaran penanganan pengaduan belum mencukupi untuk menindaklanjuti aduan yang disampaikan ke Balai PPHLHK wilayah Sumatera. *Kedua*, kebutuhan SDM yang berkompetensi dalam penanganan pengaduan secara administrasi dan teknis dilapangan dianggap sangat kurang untuk mengakomodir jumlah pengaduan yang terus meningkat. *Ketiga*, kebutuhan alat dukungan teknis lapangan masih sangat kurang memadai untuk melakukan uji portable setiap parameter kunci. *Keempat*, proses koordinasi yang sulit antara masyarakat dan PEMDA membuat kepentingan berbagai pihak. *Kelima*, kualitas pengaduan yang masuk terkadang diluar tipologi kehutanan dan lingkungan hidup sehingga diperlukan penyaringan yang lebih teliti terhadap pengaduan yang telah masuk.

TABEL 3.8 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sektor Tahun 2022

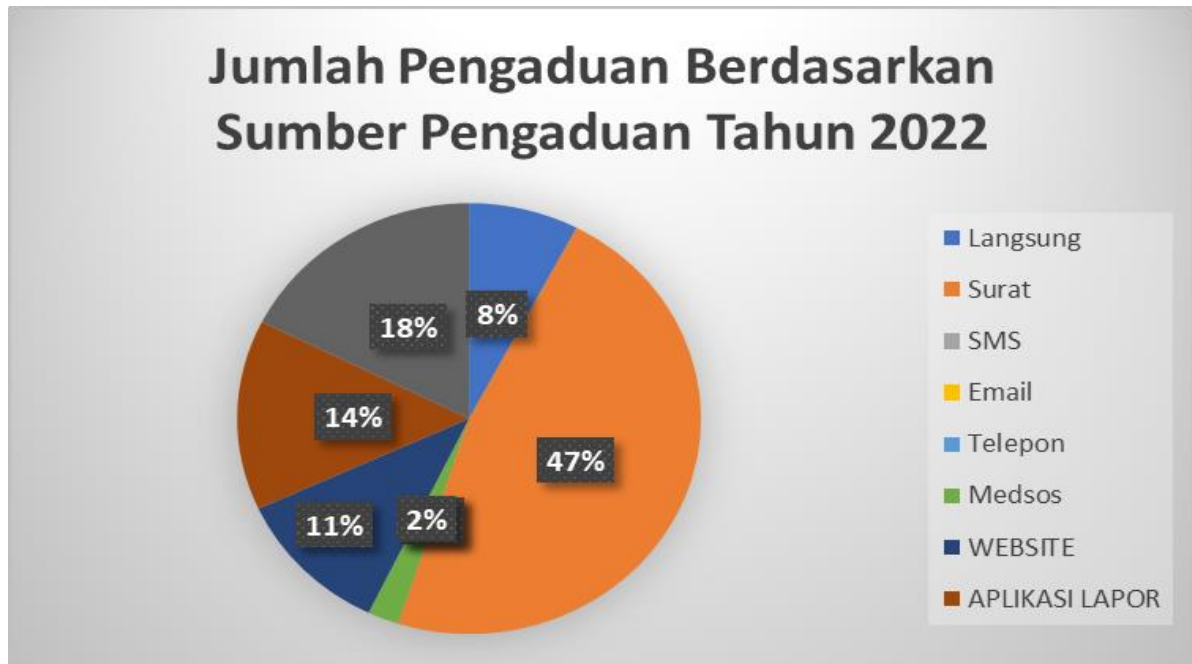
No.	Seksi Wilayah	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Status		Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Tanpa Perizinan	Tipologi/Sektor			
				Proses	Selesai		LH	Kehutanan	LHK	Non LHK
1	SW-1	Aceh	11	5	6	0	2	6	0	0
2	SW-1	Sumut	46	25	21	0	11	17	0	0
3	SW-2	Riau	24	2	22	42	5	9	0	0
4	SW-2	Sumbar	8	1	7	0	2	2	0	0
5	SW-2	Kepri	5	1	4	0	2	1	0	0
6	SW-2	Jambi	8	1	7	0	3	2	0	0
7	SW-3	Sumsel	10	0	10	0	1	4	0	1
8	SW-3	Bengkulu	6	0	6	0	1	1	0	0
9	SW-3	Kep. Babel	11	0	11	0	2	5	0	0
10	SW-3	Lampung	3	0	3	0	3	0	0	0
Total			132	35	97	42	32	47	0	1

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat, SMS, email, Telepon, website aplikasi pengaduan, WhatsApp dan media sosial serta melampirkan bukti atau data pendukung sesuai dengan formulir pengaduan.

Berdasarkan sumber pengaduan, 132 pengaduan dengan rincian 97 pengaduan telah selesai dilakukan verifikasi lapangan ditambah 42 kegiatan pengambilan data informasi potensi pengaduan terhadap kegiatan usahan yang tidak memiliki perizinan di provinsi Riau. Pengaduan yang diterima secara langsung sebanyak 14 (8%), surat sebanyak 57 (47%), email sebanyak 2 (2%), telepon sebanyak 0 (0%), media sosial sebanyak 2 (2%), website pengaduan sebanyak 14 (11%) dan lain-lain seperti serta aplikasi lapor dan lain-lainnya sebanyak 26 (14%) dan 17 (47%).

TABEL 3.9 Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2022

No.	Seksi Wilayah	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Status		Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Tanpa Perizinan	Tipologi/Sektor				Sumber Pengaduan								
				Proses	Selesai		LH	Kehutanan	LHK	Non LHK	Langsung	Surat	SMS	Email	Telepon	Medsos	WEBSITE	APLIKASI LAPOR	LAIN-LAIN
1	SW-1	Aceh	11	5	6	0	2	6	0	0	1	5	0	2	0	1	0	0	2
2	SW-1	Sumut	46	25	21	0	11	17	0	0	8	16	0	0	0	0	2	15	5
3	SW-2	Riau	24	2	22	42	5	9	0	0	0	14	0	0	0	0	4	0	6
4	SW-2	Sumbar	8	1	7	0	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	2	0
5	SW-2	Kepri	5	1	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1
6	SW-2	Jambi	8	1	7	0	3	2	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0
7	SW-3	Sumsel	10	0	10	0	1	4	0	1	3	5	0	0	0	0	0	1	0
8	SW-3	Bengkulu	6	0	6	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1
9	SW-3	Kep. Babel	11	0	11	0	2	5	0	0	1	6	0	0	0	0	3	0	1
10	SW-3	Lampung	3	0	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
Total			132	35	97	42	32	47	0	1	14	57	0	2	0	2	14	26	17



GRAFIK 3.4 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2022

Pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi dokumen perizinan, verifikasi lapangan (pengawasan), pengumpulan data dan informasi (puldasi), pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), atau pelimpahan ke Instansi atau Unit terkait. Sehingga data atau berkas pengaduan dapat dikatakan sebagai pintu masuk kegiatan penegakan hukum kasus lingkungan hidup dan kehutanan atau pun non KLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2017).

Meskipun KLHK dalam hal ini Direktorat PPSA telah membangun website aplikasi pengaduan <https://pengaduan.menlhk.go.id> namun jumlah pengaduan melalui surat masih jauh lebih besar 61% dibandingkan dengan melalui website 1%. Hal ini kemungkinan karena banyaknya bukti atau data-data pendukung yang membutuhkan waktu atau kemudahan akses dalam proses *upload* dan adanya keterbatasan alat pemindai (*scanner*) bagi Pengadu dalam melampirkan bukti. Pilihan ke-3 terbesar adalah melalui WhatsApp dan media sosial.

Kasus pengaduan berdasarkan Provinsi dimulai dari jumlah terbanyak yakni Sumatera Utara 44 (28%), Riau 31 (20%), Jambi dan Sumatera Selatan dengan masing-masing 15 (10%) dan 15 (10%), Aceh 13 (8%), Kepulauan Bangka Belitung 11 (7%), Sumatera Barat 9 (6%), Kepulauan Riau 7 (5%) dan Bengkulu 3 (2%).

Pelaksanaan Pengawasan Izin Terhadap Penanggung Jawab Usaha

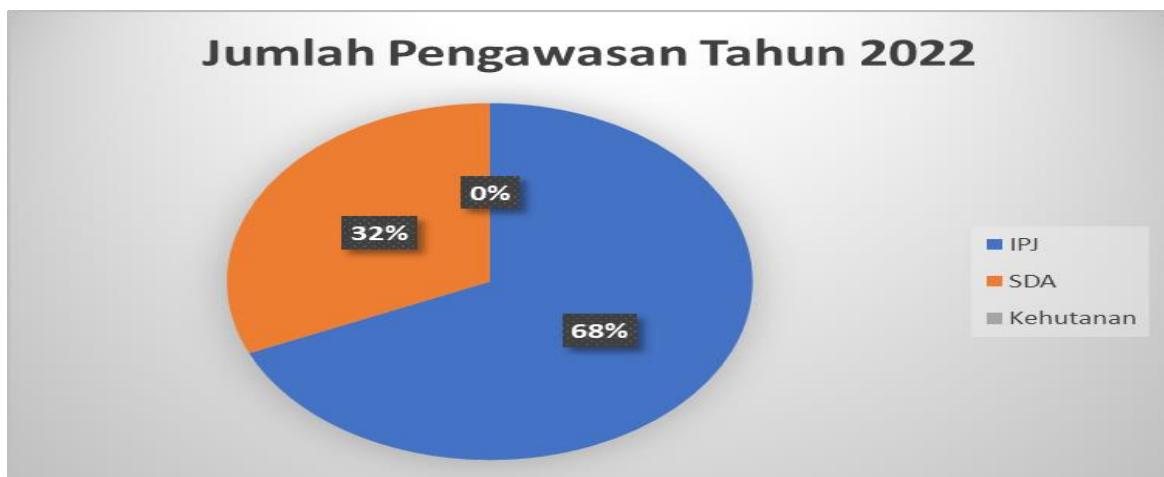
Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 19 perusahaan atau 100% dari target yang diamanatkan kepada Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Bidang perusahaan tersebut yakni 13 di bidang Industri Prasarana Jasa (IPJ) atau 68,42%, 6 di bidang Sumber Daya Alam (SDA) atau 31,57% dan 0 di bidang kehutanan atau 0%, dengan rekomendasi: 7 taat, dan 4 tidak taat, 7 paksaan pemerintah, 1 teguran tertulis.

TABEL 3.10.a Jumlah Pengawasan berdasarkan Sektor Industri/Jenis Usaha (Pengawasan Reguler)

No.	Sektor	TAAT	TIDAK TAAT							Tidak Beroperasi	JUMLAH
			Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Pulbaket	Pidana		
1	SDA			2							2
2	IPJ	3	1	5							9
	SUB TOTAL	3	1	7	0	0	0	0	0	0	11
	TOTAL	3	8							0	11

TABEL 3.10.b Jumlah Pengawasan berdasarkan Sektor Industri/Jenis Usaha (Sanksi Administrasi)

No.	Sektor	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	SDA	2	2	4
2	IPJ	2	2	4
	TOTAL	4	4	8



GRAFIK 3.5 Jumlah Pengawasan Tahun 2022

Kegiatan pengawasan lebih sering dilakukan pada bidang Sumberdaya Alam dan Industri Prasarana Jasa. Jumlah pejabat fungsional pengawas yang masih terbatas dan alokasi kebutuhan anggaran yang masih kurang menjadi permasalahan yang menghambat kinerja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera masih belum optimal.

TABEL 3.11 Hasil Pengawasan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022 (Pengawasan Reguler)

No.	Provinsi	TAAT	TIDAK TAAT							Tidak Beroperasi	JUMLAH
			Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Pulbaket	Pidana		
1	Aceh										0
2	Sumatera Utara	3	1	1							5
3	Riau										0
4	Kepulauan Riau			2							2
5	Jambi										0
6	Sumatera Barat										0
7	Sumatera Selatan										0
8	Kep. Bangka Belitung										0
9	Bengkulu			2							2
10	Lampung			2							2
	SUB TOTAL	3	1	7	0	0	0	0	0	0	11
	TOTAL	3				8				0	11



GRAFIK 3.7 Hasil Pengawasan Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 (Sanksi Administrasi)

No.	Provinsi	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	Aceh			0
2	Sumatera Utara		1	1
3	Riau	4	3	7
4	Kepulauan Riau			0
5	Jambi			0
6	Sumatera Barat			0
7	Sumatera Selatan			0
8	Kep. Bangka Belitung			0
9	Bengkulu			0
10	Lampung			0
	TOTAL	4	4	8

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022 terdapat 2 (dua) kegiatan pengawasan yaitu pengawasan reguler dan pengawasan terhadap sanksi administrasi. Pengawasan reguler dilakukan pada 4 provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Lampung. Pengawasan hasil sanksi administrasi pada provinsi Sumatera Utara dan Riau.

Berdasarkan kegiatan pengawsan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022, Balai PPHLHK Wilayah Sumatera mencatat bahwa diperlukan peningkatan kompetensi PPLH untuk mendukung dinamika kebijakan dan teknis pengawasan yang terus menerus meningkat, PPLH sering terkena dalam pengujian suatu parameter lingkungan hidup karena mereka belum dilengkapi dengan multiparameter yang digunakan untuk menguji pada saat pengawasan, dan dukungan anggaran yang masih kurang untuk mengoptimalkan kinerja PPLH di lapangan.

Peraturan dan kebijakan yang terlalu cepat berubah dan bertambah menyebabkan pelaku usaha belum mengetahui setiap perubahan peraturan yang berlaku sehingga sering kali perusahaan menjadi tidak taat. Perusahaan juga masih banyak yang belum berkomitmen terhadap rekomendasi pengawasan dikarenakan beban biaya yang sangat mahal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi			
1	Penanganan pengaduan		Verifikasi lapangan pada tanggal 5 s.d. 9 September 2022 terkait dugaan pencemaran lingkungan meliputi (1) tidak ditutupnya saluran air limbah <i>nursery</i> menuju saluran irigasi masyarakat oleh PT Toba Pulp Lestari dan (2) dugaan banjir di Desa Lumban Sitorus yang disebabkan penanaman monikultural oleh PT TPL.
2	Pengawasan terhadap izin penanggung jawab usaha		Pengawas lingkungan hidup melakukan pemeriksaan outlet kolam pengendapan lumpur PT Bara Adhipratama di Bengkulu Utara dalam rangka pengawasan penataan lingkungan hidup pada tanggal 13 s.d. 16 Juni 2022.

Kegiatan 4: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penanganan kasus tindak pidana berawal dari kegiatan operasi yang merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, rekomendasi dari kegiatan pengawasan, dan pelimpahan dari Intansi atau unit terkait. Kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan meliputi kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), penanganan barang bukti, proses penyidikan, fasilitasi penanganan tindak pidana, peningkatan kapasitas, gelar perkara dan koordinasi. Tahun 2022, ada 2 IKK Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Balai PPHLHK Wilayah Sumatera yakni:

TABEL 3.12 Capaian IKK Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4a	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21.	46 Kasus	50 Kasus	108
4b	Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan.	4 Orang	4 Orang	100

4a. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21.

Capaian IKK Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 yakni sebanyak 50 kasus atau 106% dari target 45 kasus, yang terdiri dari 13 kasus TSL (41,6%), 18 kasus *illegal logging* (41,6%), dan 19 kasus perambahan (14,5%).

TABEL 3.13 Jumlah P-21 Berdasarkan Tipologi Kasus Tahun 2022


No.	Seksi Wilayah	Provinsi	TSL	Illog	Perambahan (kebun/tambang)	Karhutla	Pencemaran LH	Sampah, Limbah, dan B3	Perusakan Lingkungan	Total
1	SW-1	Aceh	4							4
2	SW-1	Sumut	3	1	2					6
3	SW-2	Riau		9	1					10
4	SW-2	Sumbar	3		7					10
5	SW-2	Kepri								0
6	SW-2	Jambi	2	1	2					5
7	SW-3	Sumsel	1		3					4
8	SW-3	Bengkulu								0
9	SW-3	Kep. Babel			4					4
10	SW-3	Lampung		7						7
Total			13	18	19	0	0	0	0	50

Wilayah kerja BPPHLHK mencakup 10 provinsi, jumlah P-21 terbanyak di provinsi Riau dan Sumatera Barat yaitu 10 kasus, kemudian provinsi Lampung 7 kasus, provinsi Sumatera Utara 6 kasus, Jambi 5 kasus, Aceh, Sumatera Selatan dan Kepulauan Babel masing-masing 4 kasus, Sumatra Barat 4 kasus, Aceh 3 kasus. Penanganan kasus yang sering terjadi pada kegiatan perambahan perkebunan dan kegiatan *illegal logging* hasil hutan kayu serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai P21 sering kali mengalami hambatan seperti pemenuhan barang bukti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran sungai sangat sulit. Sifat barang bukti yang dinamis dilapangan menjadi faktor utama para penyidik menyelesaikan kasus tersebut sampai P21. Ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten pada kasus tertentu sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus pidana karena berdasarkan KUHAP pasal 184 menyatakan keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk menguatkan suatu tindak pidana.

4b. Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan

Berdasarkan Renstra 2020 – 2024, selama 5 tahun peningkatan kapasitas PPNS akan dilaksanakan kepada 30 PPNS dari 47 PPNS Balai PPHLHK. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas kepada 4 orang PPNS atau 100% dari target 4 PPNS. Kebutuhan PPNS masih sangat kurang melihat dari pertambahan jumlah kasus yang ditangani oleh Balai PPHLHK wilayah sumatera.

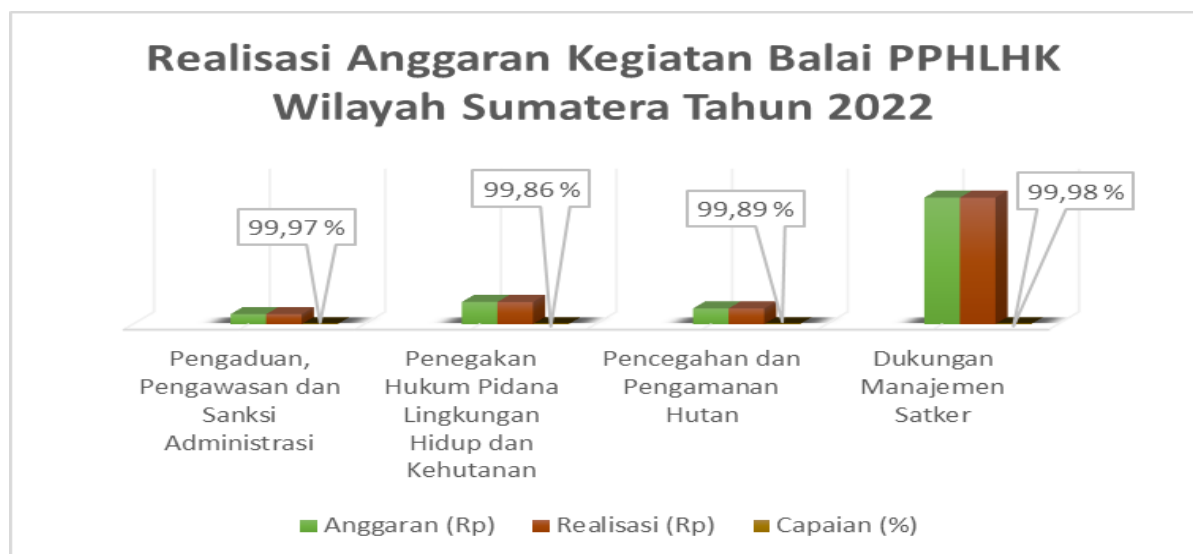
No.	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Penegakan Hukum Pidana LHK			
			<p>Berkas kasus kepemilikan satwa yang dilindungi dengan tersangka TRPA, Bupati Langkat non aktif dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2 November 2022. Berkas perkara merupakan hasil penyerahan oleh Balai Gakkum KLHK Sumatera yang sebelumnya telah menetapkan TRPA sebagai tersangka pada 9 Juni 2022. Barang bukti yaitu 1 ekor elang brontok fase terang, 2 ekor burung beo, 2 ekor jalak bali, 1 ekor monyet hitam sulawesi, 1 ekor urang utan sumatera.</p>

B. REALISASI ANGGARAN

Balai PPHLHK Wilayah Sumatera pada tahun 2022 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 43.031.767.320 atau 99,95% dari target sebesar Rp 43.051.645.000. Realisasi anggaran terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 25.103.837.877 atau 99,97%; Belanja Barang sebesar Rp 17.239.462.551 atau 99,89%, dan Belanja Modal sebesar Rp 682.014.850 atau 99,83%.

TABEL 3.15 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			2.490.018.000	2.489.160.904	99,97
	Meningkatnya pelaku usaha dan atau kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas PPLH	5 Orang	40.000.000	39.946.892	99,87
		Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	143 Perusahaan	2.450.018.000	2.449.214.012	99,97
2.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			5.494.290.000	5.486.757.198	99,86
	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Peningkatan kapasitas PPNS	4 Orang	24.000.000	23.787.047	99,11
		Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	46 Kasus	5.470.290.000	5.462.970.151	99,87
3.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			3.902.497.000	3.898.046.823	99,89
	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7 Operasi	1.718.665.000	1.715.980.506	99,84
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	11 Operasi	1.959.732.000	1.958.445.717	99,83
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	40 Orang	224.100.000	223.620.600	99,79
4.	Dukungan Manajemen Satker			31.164.840.000	31.157.518.202	99,98
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Balai PPHLHK	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1 Layanan	1.000.000.000	999.057.326	99,91
		Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	1 Layanan	30.164.840.000	30.158.460.876	99,98



GRAFIK 3.9 Capaian (%) Anggaran Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kegiatan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera 2022 merupakan laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tahun 2022, Balai PPHLHK telah berhasil merealisasikan bahkan melebihi target yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebesar 273.332,13 hektar atau 102% dengan kegiatan operasi sebesar 11 operasi atau 100%, Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebesar 158 perusahaan atau 106%, dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 50 kasus atau 108%.

Meskipun target tersebut telah tercapai bahkan melebihi target, pelaksanaannya tidak terlepas dari masalah. Masalah tersebut tentunya menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja Balai PPHLHK dalam penegakan hukum. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), pertumbuhan dunia usaha yang semakin terbuka, perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya di bidang industri serta kondisi Pandemi Covid-19, tentunya akan berdampak kepada tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan penanganannya. Untuk itu perlu sejumlah langkah untuk mengatasi dampak yang timbul yang sekaligus juga meningkatkan kinerja Balai BPPHLHK ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan dukungan manajemen (meliputi alokasi pagu anggaran setiap kegiatan, penyusunan Lakip, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan penyelenggaraan SPIP);
2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM, baik itu terkait peraturan per undang-undangan maupun teknologi mengingat pertambahan beban kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya;
3. Meningkatkan kapasitas alat pendukung teknis dalam setiap kegiatan penegakan hukum agar dapat terlaksana dengan baik;
4. Mengembangkan metode atau teknologi kegiatan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik khususnya kegiatan penanganan pengaduan dan operasi pengamanan

hutan dan hasil hutan, mengingat wilayah kerja Balai PPHLHK cukup luas meliputi 10 provinsi yang didalamnya terdapat 120 Kabupaten dan 34 Kota;

5. Membangun sistem manajemen kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak dalam penanganan kasus dengan instansi lainnya yang mendukung, pemerintah daerah sampai dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.
6. Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan izin, operasi pengamanan dan penegakan hukum pidana, guna mempercepat pengambilan keputusan, seperti ketersediaan riwayat dari penaatan Perusahaan dan dokumen perizinannya;
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik itu capaian anggaran maupun indikator kegiatan serta sarana prasarana pendukung.